BAB III

SEJARAH HIDUP DAN KONSEP KHILAFAH MENURUT ABUL 'ALA AL-MAUDUDI DAN ALI SYARI'ATI

Untuk memperoleh pemahaman yang relatif kritis serta komprehensif mengenai persoalan khilafah. Maka perlunya disajikan secara ringkas sejarah hidup dan latar belakang pemikiran dari pemikir-pemikir Islam. Sengaja dalam ulasan ini hanya ditampilkan dua pemikiran, yang dianggap secara relatif sudah cukup dominan dikalangan para pemikir Islam yang menyetujui sistem khilafah sebagai teori politik Islam.

Al-Maududi dipilih untuk mewakili tradisi pemikiran Sunni yang sangat getol menyuarakan pembentukan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islami. Dari barisan kaum pembaharu pemikiran Islam di zaman moderen, Maududi jelas merupakan tokoh yang paling produktif mengeluarkan ide-ide pembaharunya.

Sedangkan Syari'ati dipilih sebagai bahan perbadingan untuk mewakili tradisi pemikiran Syi'ah. Selain itu dari tingkat produktivitas penulisannya, Syari'ati merupakan salah satu artsitek utama terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979, yang berhasil membentuk suatu pemerintahan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Konsep Khilafah al-Maududi

1. Sejarah hidup al-Maududi

Abu al-A'la al-Maududi dilahirkan di Aurangabad, suatu kota terkenal di daerah yang sekarang dikenal sebagai Andra Pardesh, India, pada tanggal 3 Rajab 1321 atau 25 September 1903. Semasa kecilnya Maududi dididik oleh oleh ayahnya sendiri, seorang ahli hukum dan juga seorang pengikut sufi yang meninggalkan profesinya sebagai pengacara. Setelah mencapai usia 11 tahun Maududi mengikuti ujian masuk ke sekolah lanjutan, dan di sekolah tersebut pertama kalinya dia mendapat pelajaran ilmu kimia, ilmu alam, matematika dan sebagainya. Dia dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, dan menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya dengan mendapatkan ijazah *Maulawi*. Ketika Maududi meneruskan pelajarannya di perguran tinggi Darul Ulum, salah satu lembaga pendidikan tinggi tempat "mencetak" ulama India waktu itu. Ayahnya jatuh sakit, hal ini mengganggu pendidikannya karena kesulitan biaya dengan semakin parah penyakit ayahnya kemudian meninggal, pendidikan Maududi terhenti secara formal.[1]

---

[1]Munawir Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 157-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kemauan kerasnya untuk mencari ilmu, ia menekuni pelajaran-pelajarannya di luar lembaga formal dengan metode autodidak. Pada awal 1920-an Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris, disamping itu bahasa Urdu, bahasa ibunya. Sebagian besar ilmu yang diperoleh Maududi dapat dikatakan lewat jerih payahnya sendiri dengan bimbingan sarjana-sarjana yang tangguh pada waktu itu dalam lingkungannya. Sejak saat itu ia tampil menjadi seorang wartawan yang piawai dan penulis sejumlah artikel dan risalah-risalah pendek mengenai masalah-masalah keagamaan, sosial dan politik, pada usia 20-an. Pada usia muda inilah Maududi menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul al-Jihad fi al-Islam, suatu buku yang sangat cermat dan tajam mengenai Islam dan perang.[2]

Pada tahun 1919 di India berdirilah gerakan dengan tujuan mendukung kelangsungan khilafah Islamiyah pada dinasti Utsmani yang berpusat di Istambul, dan Maududi menggabungkan diri dengan gerakan tersebut. Dia merupakan salah seorang propagandis terkemuka dari gerakan khilafah, dan kemudian dipercaya memimpin penerbitan organisasi

---

[2]Kata pengantar Amien Rais dalam al-Maududi, *"Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam"*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panitia pusat itu, bernama *al-Jam'iyah* dari tahun 1924-1928.

Awal mula mulai nampaknya pemikiran Maududi tentang khilafah, di India terjadi dua peristiwa yang penting yang merupakan katalisator yang mendorong Maududi untuk mengambil peran sebagai pemimpin, pemikir Islam, dan juru bicara gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada tahun 1925, seorang tokoh dari kebangunan Hindu Swami Shradhanand terbunuh, yang pada akhirnya peristiwa tersebut menyulut perdebatan antara kaum Muslimin dan kaum Hindu. Kaum Hindu melemparkan tuduhan bahwa peristiwa itu digerakkan oleh kaum Muslimin. Maududi merasa terpanggil untuk menjelaskan tentang sikap-sikap Islam terhadap kekerasan/perang dengan memperkenalkan butir-butir pikirannya yang kemudian hari berkembang menjadi konsepsi Islam tentang kemasyarakatan dan bernegara.

Peristiwa kedua yang amat mempengaruhi sikap dan pikiran Maududi adalah gerakan kemerdekaan di India, khususnya masalah hari depan hubungan antara umat Hindu dan umat Islam selepas India dari penjajahan Inggris. Maududi menangkap realitas ini dengan keprihatinan umat Islam di India tentang akan dapat atau tidaknya dipertahankan identitas dan pola hidup Islami dalam negara India nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu Maududi sangat menentang gagasan nasionalisme Islam yang merupakan garis perjuangan liga Muslim. Menurutnya gagasan nasionalisme itu sesuatu yang diimpor dari Barat, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dari apa yang dinamakan negara Islam. Dengan sikapnya yang menentang masuknya umat Islam India dalam satu negara tunggal India yang akan didominasi umat Hindu, dan penolakannya terhadap gagasan nasionalisme yang sekularis itu, Maududi berpendirian bahwa sebagai jalam keluar harus diadakan revolusi Islam.[3]

Selanjutnya Maududi sejak tahun 1937 hingga 1939 pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan bertemu beberapa tokoh Islam seperti Muhammad Iqbal seorang penyair besar Islam, dan Chaudry T. Ali yang memberikan tawaran tanah wakaf yang dinamakan *Dar al-Islam* sebagai kegiatan dan gerakan dakwahnya. Disinilah Maududi merencanakan pembangunan suatu perkampungan yang betul-betul Islam dalam segala seginya. Kemudian pada tahun 1939, ia meninggalkan *Dar al-Islam* dan pindah kembali ke Lahore. Karena kesalah fahaman antara Maududi dengan Chandry T. Ali.[4]

---

[3] Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, hlm. 161.

[4] *i b i d.*, hlm. 162-163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awal 1940-an Maududi mendirikan suatu gerakan Islam yang dipimpinnya sendiri, yaitu *Jama'ati al-Islami*. Gerakan ini hakikatnya merupakan gerakan kader-kader Islam dan tidak pernah menjadikan gerakan massa. Dan ketika Pakistan lahir pada tahun 1947, Maududi mulai memusatkan tenaga dan pikirannya untuk ikut mendirikan suatu negara Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Gagasan-gagasannya seringkali bertabrakan dengan beberapa kebijakan pemerintah Pakistan, yang pada akhirnya mengantarkan dirinya pada pengasingan oleh pemerintah. Penjara bagi x2Maududi bukanlah tempat tinggal yang asing lagi. Tekad teguh untuk mempertahankan pendiriannya benar-benar dikagumi kawan maupun lawan perjuangannya.[5]

Pada tahun 1953 Maududi dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan "subversif" berkaitan dengan masalah sekte Ahmadiyah Qodiyani. Dengan tanpa meminta permohonan pengampunan atau naik banding pada penguasa. Dengan sangat gembira ia memilih kematian dari pada meminta pengampunan. Atas keteguhan ini, Maududi, oleh pemerintah Pakistan dirubah hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup.[6]

---

[5]Kata Pengantar Amien Rais dalam Abul al'Ala al-Maududi *op.cit.* hlm. 9.

[6] *I b i d.*, hlm. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan Politik Al-Maududi

Sebagai penulis yang amat produktif, Maududi telah banyak menghasilkan risalah dan buku. Yang kebanyakan memuat pikiran-pikirannya tentang prinsip-prinsip dasar bagi negara Islam.[7] Menurut Maududi, asas terpenting dalam Islam adalah *tauhid*, sebab para Nabi dan Rasul diutus oleh Allah mempunyai tugas pokok untuk mengajarkan tauhid (Keesaan Tuhan, *The unity of Godhead*) kepada seluruh manusia. Tampaknya tugas menanamkan tauhid pada manusia cukup mudah dan sederhana. Maududi mempunyai keyakinan bahwa doktrin-doktrin yang terkandung dalam ajaran tauhid itu sangat revolusioner dan mempunyai implikasi sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik, dan tata ekonomi yang sudah ada yang tidak bersendikan tauhid. Jadi tidak aneh, banyak orang yang menentang doktrin-doktrin sosial dan politik yang bersumber tauhid, berhubung doktrin-doktrin revolusioner yang bersumberkan tauhid selalu menentang penindasan, tirani dan pelestarian *vested interest* yang tidak adil.[8]

---

[7] Prinsip-prinsip dasar bernegara dalam Islam dibahas oleh al-Maududi dalam bukunya *Hukum Dan Konstitusi: Sistem Politik islam* sebagai pelengkap buku *Khilafah dan Kerajaan...* lihat hlm. 156-158.

[8] Kata Pengantar, Amien Rais, *op.cit.*, hlm.13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah pokok yang menjadi pertentangan besar antara para nabi dengan lawan-lawan mereka bukanlah terletak pada pengingkaran musuh-musuh nabi terhadap wujud atau eksistensi Tuhan, pertentangan itu terletak pada tuntutan al-Qur'an yang sangat tegas agar seluruh manusia mengakui Tuhan sebagai *rabb* dan sekaligus sebagai *ilah*. Maka seseorang yang telah berikrar dengan *la ilaha illallah*, berarti telah bersedia mematuhi kehendak allah. Oleh karena itu hubungan antara manusia dengan *rabb*-nya harus ditandai dengan kepasrahan, ketaatan, dan kesetiaan (*the allegiance of man*). Dengan demikian menjadi jelaslah setiap klaim yang dinyatakan oleh penguasa negara sejak dulu sampai sekarang: bahwa mereka wajib ditaati tanpa reserve, adalah batal dengan sendirinya didalam islam; bahkan Islam melaknati dan memerangi klaim seperti itu (*the claim to godhood*).[9]

Maududi menegaskan, bahwa tirani, depotisme, kesewenang-wenangan, ketidak-adilan dan eksploitasi manusia atas manusia, adalah sumber malapetaka. Inilah hambatan sesungguhnya bagi kemajuan. Penguasa yang berlagak memainkan fungsi *ilahia* (overlordship) dan *rububia* (domination) adalah seperti kanker yang merusak jaringan kehidupan moral, intelektual, politik

---

[9] *I b i d.*, hlm. 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ekonomi masyarakat, serta nuilai-nilai harkat manusia.[10]

Menurut Maududi, kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral, merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. Ajaran pokok Islam menyatakan bahwa manusia, secara individual maupun kolektif, harus memberikan semua hak untuk memimpin, menetapkan aturan dan melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya kepada sesamanya. Ini berarti tak seorangpun berhak menyatakan berlakunya suatu aturan atau mengeluarkan perintah atas kemauannya sendiri saja, atau membuat hukum atas kemauannya sendiri. Maka tidak ada kewajiban sama sekali bagi sipapun untuk tunduk kepada aturan, perintah atau hukum seperti itu. Hak (untuk menetapkan aturan hukum) ini berada ditangan Allah semata, sebagaimana diyantakan dalam firman Allah sebagai berikut:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus...(QS 12:40)[11]

---

[10] *I b i d.*, hlm. 17.

[11] Departeman Agama RI., *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm. 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

"Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?" Katakanlah (Muhammad): "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya ditangan Allah". (QS 3:154).[12]

Jadi dasar-dasar politik Islam, menurut Maududi dengan mengutip pada pernyataan-pernyataan al-Qur'an diatas, bahwa:

Tak seorangpun atau kelompok masyarakat yang mengklaim diri sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan yang mutlak , kecuali hanya Allah. Dan Allah adalah pembuat aturan hukum dalam arti seutuhnya dan wewenang untuk menetapkan berlakunya aturan hukum itu secara mutlak berada ditangan-Nya. Dan dalam segala hal, negara Islam harus dibentuk berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan Allah melalui Nabi, dan diberi kepercayaan sebagai lembaga politik dalam rangka menjalankan kekuasaanya sesuai dengan aturan-aturan hukum Allah. Jika pemerintah itu tidak menghargai lagi hukum hukum yang diwahyukan Allah itu, maka perintah-perintah yang dikeluarkannya tidak mempunyai kekuatan pengikat bagi orang-orang yang beriman.

---

[12] *I b i d.*, hlm. 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Khalifah Dalam Pandangan Al-Maududi

Berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, terutama, pada surat An-Nur ayat 55 sebagai berikut :

"... Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah diatas bumi..."

Al-Maudi menegaskan, bahwa doktrin tentang khilafah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ialah bahwa segala sesuatu diatas bumi ini, daya upaya dan kemampuan yang ada pada manusia, hanyalah karunia Allah. Dan adapun yang diserahi khilafah yang sah dan benar ada pada komonitas secara keseluruhan.[13].

Maka setiap kelompok kaum muslimin, adalah sekutu di dalam khilafah. Bilamana ditinjau dari ayat diatas tidak seorang atau kelas pun dapat mengklaim bahwa khilafah hanya dikhususkan kepadanya, melainkan secara kolektif. Inilah yang membedakan khilafah Islamiyah dari sistem kerajaan dan bentuk pemerintahan lainnya. Bahkan, khilafah Islamiyah lebih mengarah pada demokrasi, berbeda dengan demokrasi barat. Demokrasi islamiyah, menurut Al-Maududi, bahwa rakyat mengakui kekuasaan tertinggi ada ditengah Allah.[14]

---

13. Al-Maudi, Khilafah dan Kerajaan. (Bandung, Mizan 19-96) hlm. 67

14 Ibid. hlm. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada pronsip diatas Al-Maududi menyatakan, dalam Islam, kekuatan yang tertinggi ada ditangan Tuhan. Dengan tetap pada prinsip ini, dapat diamati posisi orang-orang yang diberi kekuasaan, menegakkan hukum Tuhan di bumi. Haruslah dipandang sebagai wakil dari penguasa tertinggi.

Inilah yang merupakan konsep politik Al-Qur'an yang paling mendasar dan yang paling revolusione. Menurut Al-Maududi, bahwa sepanjang berkaitan dengan kedaulatan Tuhan atas Alam semesta, ditunutut juga bagi mereka untuk mengakui Dia sebagai berdaulat atas kehidupan moral, budaya, ekonomi, dan politik manusia.[15] Sebagai konsekuensi politik Negara Islam, menurut Al-Maududi disebut *khilafah*. Dan seorang *khalifah* berarti orang yang menikmati hak-hak dan kekuasaan tertentu yang bukan haknya sendiri, melainkan hak sebagai wakil atau kuasa Tuhannya.[16]

Adapun menyangkut persoalan penunjukan kepala negara. Al-Maududi merujuk pada sejarah awal. Yang digali dari preseden-preseden konstitusional otentik sebagai berikut :

1. Dalam suatu Negara Islam , pemilihan kepala negara sepenuhnya bergantung pada masyarakat umum, dan tak

---

15 Ibid. hlm. 188

16 Ibid. hlm. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorangpun berhak untuk mengangkat diri dengan paksaan atau kekerasan sebagai Amir mereka.

2. Tidak ada satu klan ata satu kelompok pun yang memonopoli jabatan ini.
3. Pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip kehendak bebas kaum muslimin dan tanpa adanya pemaksaan atau ancaman.[17]

Dalam kaitan dengan pemilihan ini, Maududi dengan rujukan pada historis-faktual, menolak sistem pemilihan kepala negara dengan cara pemilihan umum. Maududi menghendaki pemilihan seorang kepala negara dengan jalan musyawarah, yaitu membentuk suatu lembaga yang disebut Dewan Permusyawaratan (Majlis Syura). Yang didalamnya duduk para anggota-anggota yang mendapat kepercayaan kaum Muslmin, berdasarkan pada ketaqwaannya. Atau yang lebih dikenal dengan ahl al-hall wa al-'aqd[18] "orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat". Tugasnya antara lan adalah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung.[19]

Berdasarkan interprestasi Maududi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yag menegaskan bahwa otoritas dan

17 Abul Al-'Ala Al-Maududi, hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam. Bandung:Mizan, 1995) hlm. 258-259

18 Ibid. hlm. 262

19 Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A. "Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1994) hlm. 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

souvernitas tertinggi ada pada Tuhan, maka oleh Maududi, berdirinya negara islam berdasarkan pada dasar-dasar yaitu:

Pertama, Islam adalah sutau agama paripurna yang memuat prinsip-prinsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan moral, etika serta petunjuk dibidang politik, sosial dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya sebagai satu keyakinan tetapi satu sistem, yang lengkap yang mengandung seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami manusia. Semua itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan praktis tanpa adanya negara yang menjamin pelaksanaannya. Agama Tuhan hanya bisa dicapai dengan menegakkan dan menjadikan Tuhan sebagai hukum negara. Jika hukum selain hukum Tuhan yang menjadi pegangan, maka berarti menolak agama itu sendiri. Konsekuensinya --menurut Maududi-- perlu adanya suatu negara Islam yang dapat menjamin pelaksanaan hukum Tuhan, mencegah kejahatan sesuai dengan tuntutan Islam. Dalam hal ini, ia merujuk pada pola politik masa Al-khulafa Al-Rasyidin sebagai model sistem kenegaraan menurut Islam.20

Kedua, Islam menggunakan "khilafah" sebagai kata kunci, bukannya kedaulatan atau yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanya milik Allah. Sehubungan

---

20 Dr. Muhammad Azhar M.A., *Filsafat politik ; Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 135-136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pengertian ini, siapapun yang memegang kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khilafah (pengganti) Tuhan Yang Maha Kuasa dan ia tidak mempunyai otorita atas sesuat, kecuali yang didelegasikan kepadanya.[21] Maududi meyakini bahwa Tuhan sebagai penguasa dan pembuat undang-undang, sedangkan negara Islam hanyalah pelaksana Tuhan.[22]

Ketiga, Negara harus didasarkan pada sebuah ideologi yang bertujuan untuk menegakkan ideologi tersebut. Karena itu orang yang menerima prinsip ini dapat bergabung dengan masyarakat yang melaksanakan pemerintahan Islam. Sebaliknya orang yang menolaknya, tidak harus berpartisipasi menentukan kebijakan pokok negara. Dan mereka yang merongrong sistem negara baik dari luar maupun dari dalam tetaplah mendapat hukm. Sebagai konsekuensinya dari prinsip ini adalah bahwa pemerintah atau badan eksekutif hanya dibentuk oelh umat Islam dan merekalah yang berhak memecat pemerintahan dari jabatannya.[23]

---

[21] Kata Pengantar Amin rais op.cit., hlm. 32

[22] Dari pengertian ini, Maududi kemudian menciptakan istilah teo-demokrasi untuk menyimpulkan konsep pilitik dan pemerintahan dalam Islam. Secara sederhana, teo-demokrasi Islam itu ialah suatu sistem kenegaraan yang memandang kekuasaan tuhan berada ditangan umat Islam dengan berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

[23] Drs. Muhammad Azhar M.A., Op.cit., hlm. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Khilafah Ali Syari'ati

1. Riwayat Hidup Ali Syari'ati

Ali Syari'ati tercatat dilahirkan pada 24 Nopember 1933 dari sebuah keluarga terhormat. Ia menjalani masa kecil ditengah keluarga yang memandang Islam sebagai doktrin sosial dan filsafat yang relevan dengan zaman modern, ketimbang sebagai keyakinan masa lalu yang pribadi yang memikirkan diri sendiri.

Di usia delapan tahun, ia mulai memasuki sekolah dasar di madrasa *Ibn Yamin*, tempat ayahnya mengajar. Tapi di sekoklah, Syari'ati memiliki perilaku yang berbeda dengan kebanyakan temannya. Ia selalu tampak menyendiri, tak mau tahu dengan lingkungannya. Ia tidak bermain sepak bola, layaknya teman sebayanya. Kesukaanya, ia juga tak pernah membaca buku yang diwajibkan sekolah, ia tak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Biarpun demikian, ia mempunyai

---

1. Ali Rahnema, *"Islam Mazhab dan Aksi"* (terj. MS. Nasrullah dan Afif Muhammad, (Bandung: Mizan, 1995).hlm iii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan membaca buku hingga larut malam, bahkan hingga menjelang pagi. Ketika masih di sekolah dasar, ia kerap nmembawa buku Victor Hugo, *Les Miserables* ketika sekolah.[2]

Sampai tahun 1950, ia pernah mengalami krisis keimanan. Gara-gara kesukaanya membaca buku Maurice Maeterlinck, Arthur Schopenhaeur, Frans Kafka dan Sadde-e Hedayat. Ia mengaku bahwa keyakinan keagamaannya terguncang sampai fondasinya. Ia begitu kagum pada pemikiran eksistensialis, bahwa ada eksistensi tanpa Tuhan. Ia merasa frustasi dan memutuskan bunuh diri di Estakhr-e Koohsangi, Masyhad, di musim dingin yang romantis. Untung, ia diselamatkan oleh sajak-sajak Maulawi yang dipenuhi oleh semangat spritualitas abadi filasafat Timur.[3]

Setelah menamatkan sekolah menengah atas di Erdowesi pada tahun 1950, Syari'ati memasuki *College,* pendidikan guru Masyhad, dan lulus pada tahun 1952. Di tahun itu pula ia bergabung dengan Gerakan Sosialis Penyembah Tuhan bersama Kazem Sami, Mehdi Momken, Kazem Ahmadzadeh dan Ibrahim Harati. Organisasi itu kemudian bergabung dengan Hezb-e Iran (Partai Iran). Tetapi pada 16 Pebruari 1953, organisasi itu keluar

---

[2] *I b i d.*, hlm. xiv.

[3] *I b i d.*, hlm. xvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Partai Iran dan mendirikan organisasi baru yang diberi nama *Jam'iyat Azadi-e Mardom-e Iran* (Liga Kemerdekaan Rakyat Iran). Tak lama setelah terjadi kudeta, Syari'ati bergabung dengan organisasi rahasia Gerakan Perlawanan Nasional. Disitu perannya adalah pengorganisasian pemogokan dan rapat umum. Ia juga aktif dalam penerbitan rahasia buku-buku dan selebaran selebaran.[4]

Di tahun 1955, Ali Syari'ati masuk fakultas sastra Universitas Masyhad yang baru saja diresmikan. Ia cepat menjadi populer karena kemampuannya di bidang sastra. Bahkan, ia sangat terkenal di lingkungan 2politik dan intelektual. Dia bukan saja mewujudkan sastra dalam syair-syairnya, namun juga berupaya keras mengidentifikasi dan menguraikan secra garis besar penjelasan nonkonvensional progresif dan modernis tentang Islam.[5]

Gairah mencari ilmu menyebabkan ia belajar diruang kelas. Di luar sekolahnya, ia sibuk belajar bahasa Arab dan Prancis, sehinggga sebelum masuk Universitas ia sudah sanggup menerjemahkan buku-buku yang ditulis dalam kedua bahasa tersebut. Ia juga bekerja sebagai penulis filsafat sejarah pada "Mazhab

---

[4] *Ibid.*, hlm. 6.

[5] *Ibid.*, hlm. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menengah" (Maktab-e Vasita). Ia aktif mengembangkan kegiatan Pusat Penyebaran Kebenaran Islam di Masyhad, sebagai penyelenggara dan penceramah sekaligus.[6]

Pada masa pra-Universitas, ia sudah menunjukan kedalam pengetahuan dan kemampuan mengungkapkan pikiran secara jernih dan ekspresif. sejak dini, ia sudah dirangsang untuk melihat ketimpangan masyarakat dan menawarkan Islam sebagai alternatif pemecahan masalah. Ketika ia menjadi mahasiswa fakultas sastra, Syri'ati menunjukan daya kritisnya. Ia sering berdebat dosen-dosennya. sebagai ilmuwan, ia membaca buku, hatta buku yang sudah tidak dihiraukan orang lagi. Disamping buku Islam, dibacanya juga buku-buku sejarah, sastra, filsafat, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.[7]

Tahun 1958, Syari'ati meraih gelar B.A. di bidang sastra Persia. Karena prestasi akademisnya di universitas ini, dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi keluar negeri. Pada April 1959, Syari'ati pergi ke Paris sendirian. Isteri dan putranya yang baru lahir bernama Ehsan, bergabung dengannya setahun kemudian. Empat tahun kemudian ia

---

[6]Kata Pengantar Jalaluddin Rahmat, dalam Ali Syari'ati, *"Ideologi Kaum Intelektual: Suatu wawasan Islam"*,(Bandung: Mizan, 1993), hlm. 19.

[7]*I b i d.*, hlm. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulang ke Teheran dengan gelar Doktor, bersama keluarganya. Syari'ati kembali mengajar di sekolah menengah, setelah menyelesaikan masa tahanannya selama enam bulan oleh pemerintah Iran. Syari'ati diterima sebagai dosen di Universitas Masyhad. Di sini ia memperoleh telinga-telinga muda yang mau mendengar kuliahnya dengan penuh minat. Gagasannya kontroversial, metode mengajarnya yang tidak konvensional, menarik ribuan mahasiswa.[8]

Namun pihak universitas memandang kuliah Syari'ati sebagai hasutan yang membahayakan rezim yang memerintah. Ia harus menghentikan kuliahnya dan dipindahkan ke Teheran. Di sini, Husainiyah-yi Irshad, sebuah institut keagamaan yang terkenal, ia memberikan kuliah-kuliahnya. Ia tidak lagi berbicara dengan kaum intelektual. Ia berbicara dengan rakyat Iran. Seperti dapat diduga, akhirnya institut tersebut ditutup dan sekali lagi Ali Syari'ati mendekam di penjara selama lima belas bulan.[9]

Setelah keluar dari penjara, walaupun diawasi dengan ketat oleh agen-agen rahasia Shah, ia masih juga memberikan ceramah-ceramah. Akhirnya, Dr. Ali Syari'ati dibunuh oleh agen rahasia SAVAK di London.

---

[8] *I b i d.*, hlm. 21.

[9] *I b i d.*, hlm. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syari'ati pergi sebelum menyaksikan para ulama dan kaum intelektual mnemimpin massa rakyat untuk menumbang rezim yang berkuasa.[10]

2. Pandangan Politik Ali Syari'ati

Ali Syari'ati adalah seorang pahlawan dan ahli ideologi revolusi di Iran, banyak menuangkan pikiran-pikiran lewat risalah dan buku-buku, yang cenderung menggabungkan antara reinterprestasi keprcayaan Islam dengan bahasa sosiologi modern.[11] Menurut Syari'ati --seperti halnya Maududi yang memandang tauhid bersifat revolusioner--satu-satunya untuk menyatukan semangat Islam, yang separuhnya telah menjadi lumpuh dan hancur, sementara yang lainnya hampa tanpa jiwa, adalah kembali pada "kesadaran diri"[12] dengan berpandangan pada tauhid yang terbuka, cerah, dan melahirkan tanggung jawab.

Syari'ati menekankan sifat dinamis, progresif,

---

[10]Lihat dalam Drs. Azyumardi Azra, *"Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme"*, (Jakarta: Piramida, 1998), hlm. 69.

[11]Belakangan dalam tulisan-tulisannya, Syari'ati kadang-kadang menampilkan Imam Ali, Imam Husain dan Abu Dzar, Jean Paul Sartre, Frans Fenon, Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Mark. Lihat Azyumardi Azra, *Loc. Cit.*, hlm. 68-75.

[12]Kesadaran diri diuraikan secara singkat oleh Syari'ati dalam bukunya *"Ideologi Kaum Intelektual..."*, *Op. cit.*, hlm. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ilmiyah Islam serta kebutuhan akan penafsiran kembali Islam secara menyeluruh untuk mengembalikan peninggalan yang terlupakan, memulihkan negara Islam yang mengalaimi kemunduran, dan memperoleh kembali masyarakat Islam.

Bagi Syari'ati, masyarakat Islam sejati tidak mengenal kelas, suatu wadah bagi orang-orang yang tercabut haknya, "yang tersiksa, lapar, tertindas, dan dibedakan". Pesannya adalah pesan kerakyatan dari Tuhan yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang tertindas bahwa mereka akan menjadi pemimpin umat manusia; Tuhan telah menjanjikan kepada orang-orang tertindas bahwa mereka akan mewarisi bumi dari orang-orang yang berkuasa. Revolusi universal dan kemenangan akhirnya merupakan akhir dari gerakan pencari keadilan yang memberontak penindasan.[13]

Runtuhnya masyarakat Islam (Iran) tidak hanya disebabkan oleh imperialisme Barat tetapi juga oleh kemapanan agama yang memperbolehkan ideologi revolusioner yang dinamis yaitu Syi'isme "yang asli", menjadi agama kemapanan. Di tangan kemapanan agama, Islam Syi'ah menjadi skolastik, terlembagakan, dan secara historis dimanfaatkan oleh penguasa Iran,

---

[13]John L. Esposito, *"Ancaman Islam Mitos atau Realitas: Edisi Revisi Menggugat Tesis Huntington"*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga memudarkan pesan sosial keagamaan yang revolusioner yang dinamis pada tahun-tahun awalnya. Islam tradisional di bawah para ulama telah menjadi tenggelam di masa lalu. islam telah berhenti sebagai kekuatan sosial, yang memperhatikan kenyataan masyarakat yang berubah.[14]

Dari latar belakang semacam ini, Syari'ati menganjurkan bahwa yang dibutuhkan adalah revolusi intelektual dan kebangkitan kembali Islam sebagai suatu gerakan budaya dan ideologis yang didasarkan atas landasan-landasan terdalam dari keyakinan,[15] dilengkapi dengan sumber-sumber yang di milikinya. Dengan satu kata, kita membutuhkan Islam bukan karena ia merupakan agama masyarakat kita, pembentuk sejarah kita, semangat budaya kita, kesadaran besar kita dan perangkat kuat bagi rakyat kita dan landasan moralitas dan spiritual kita, tetapi juga karena ia merupakan "diri" manusiawi dari rakyat kita.[16]

Karena itu, menurut Syari'ati, negara-negara ketiga, seperti Iran, memerlukan dua bentuk revolusi

---

[14] *I b i d.*, hlm. 120.

[15] Kata Syari'ati: "Jika ideologi tak lagi merupakan pilihan sukarela melainkan dipaksakan, maka ia tidak lebih daripada suatu tradisi sosial, suatu bagian dari kebudayaan; ia telah kehilangan misi aslinya". Lihat Ali Syari'ati, *"Ideologi Kaum Intelektual...*, hlm. 89-90.

[16] John L. Esposito, *Loc. Cit.*, hlm. 77-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling berkaitan. *Pertama*, revolusi nasional, yang bertujuan bukan hanya untuk mengakhiri seluruh bentuk dominasi Barat, tetapi juga untuk merevitalisasi kebudayaan dan identitas nasional negara dunia ketiga bersangkutan. *Kedua*, revolusi sosial untuk menghapuskan semua bentuk ekploitasi dan kemiskinan guna menciptakan masyarakat yang adil, dan tanpa kelas. Singkatnya, Syariat'ati menegaskan, Islam yang benar adalah Islam Syi'ah awal, yakni Islam Syi'ah revolusioner yang dipersonifikasi Abu Dzar (Al-Ghifari) dan Iman Husayn. Keduanya merupakan simbol perjuangan abadi ketertindasan melawan penguasa yang zalim. Manusia yang sempurna adalah yang menggabungkan dalam dirinya iman dan rasionalisme. dan muslim sejati menurut Syari'ati adalah gabungan antara abu Ali sina (sang filosof), Al-Hallaj (sang sufi) dan Abu Dzar (yang personifikasinya ada pada Muhammad rosulullah dan Ali bin Abi Thalib,[17]

3. Khilafah dalam pandangan Syari'ati

Sebelum kita mengenal secara garis besar pandangan syari'ati tentang khilafah, berangkat dari konsep dasar keterpisahan antara *ummah* dan *imanah*. Sebelumnya, Syari'ati mempunyai keyakinan tentang

---

[17] Azumardi Azra, pergolakan poli,.....ibid hal 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah *imanah* dan hubungan antara iman sangat kabur baginya. Apa yang ia dengar dan baca selama ini, rasanya tidak sejalan dengan logika modern dan pandangan-pandangan sosiologisnya. Hingga tiba-tiba, hampir semirip ilham atau kasyaf datang membuka pikirannya untuk membuka tabir masalah tentang *ummah* dan *imamah* yang asing baginya. Yang selama ini belum bisa *tercerna melalui metode teologis*, ternyata tampak jelas sebagai suatu keniscayaan kehidupan bila dilihat dari sudut pandang sosio-politis. Sejak itulah tad ada masalah syari'ati untuk mengkaji *ummah* dengan penglihatannya yang kuat dan tajam itu.

Kajian Syari'ati terhadap masalah ini, yang menjadi landasan baginya adalah dengan menganalisis secara sosiologis. Berpijak pada satu landasan yang menganggap bahwa istilah *ummah* dan *imamah* itu mempunyai asal yang sama dari akar kata *ummi*. Kesamaan tersebut dapat mencakup makna dalam bentuknya yang tidak terbatas. Berbeda dengan istilah-istilah *nation* (bangsa), Qabilah (suku) dan massa. Menurut Syari'ati istilah *ummah* lebih unggul dan istimewa dibandingkan dengan istilah-istilah lain.[18]

Dengan kata lain isyilah ummah mengandung

---

[18] Ali Syari'ati Ummah dan Imamah : Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995) hlm.43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian : kumpulan manusia yang para anggotanya memiliki tujuan yang sama, yang satu sama lain saling bahu-membahu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan, berdasarkan suatu kepemimpinan kolektif.[19]

Dilihat dari sudut pandang ini, maka istilah *ummah* itu sendiri, sepenuhnya mengaruskan dan mewajibkan adanya *imamah*. Dengan demikian, tidak mungkin ada *ummah* tanpa *imamah*. Ia berkeyakinan bahwa ketiadaan *imamah* adalah sumber muculnya problem-problem *ummah*, bahkan kemanusiaan secara umum Syari'ati menunjukkan keharusan adanya *imamah*, dalam kerangkah ini, adalah sebagai pembimbing dan pembentuk masyarakat ideal kemanusiaan, sebagaimana diyakininya, dan bukan menurut keinginan dan restu orang-orang yang dipimpinnya. Dalam kosa kata yang menjadi favorit Syari'at, *imamah* berasosiasi dengan *siyasah* yang revolusioner, dan bukan *politique* yang kompromistis. Dalam hubungan ini, Syari'ati memberikan konotasi positif terhadap istilah fanatisme yang diartikan *espirit de corps* (semangat kelompok), yang menurutnya, merupakan salah satu fitrah atau hakikat kemanusiaan.[20]

---

[19] Syari'ati, Ummah dan Imamah, Ibid., hlm. 52.

[20] Haidar Bagir, kata pengantar. Dalam buku Ali Syari'ati Ummah dan Imamah, hlm. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab itu, Syari'ati tidak sepenuhnya meyakini pa yang selama ini (dalam Syi'ah) terhadap *intidhar* yaitu keyakinan akan adanya imam al-ashar (imam sepanjang zaman), dan adanya revolusi tuntas dizaman akhir. Karena selama masa ghaibat ajaran yang istimewa dan menempati posisi dalam filsafat sosio-politik Syi'ah merupakan penyebab kemunduran rakyat, penghambat kebebasan berkehendak, kebebasan berfikir manusia serta penyebab hilangnya rasa tanggung jawab.[21]

Dengan sendirinya pada masa *ghaib* (besar) inilah berlaku suatu sistem pemilihan khusus. Itulah yang (menurut Syi'ah) merupakan pemilihan yang demokratik, walaupun (sebenarnya) bukan merupakan demokrasi yang bear-benar bebas. Walaupun pemimpin dipilih oleh rakyat, namun dia bertanggung jawab kepada imam dan pandangan madzhabnya. Berbeda dengan calon pemimpin yang dipilih dengan cara demokratis, dia bertanggung jawab untuk melaksanakan cita-cita dan gagasan-gagasan rakyat yang memilihnya itu. Sebaliknya dia justru bertanggung jawab untuk membimbing rakyat sesuai dengan aturan-aturan hukum dan pendapat-

---

21. Ali Syari'ati Intidzar, Agama Protes. Dalam buku John J. Donhue dan John L. Esposito. Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah. Hlm. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat imam.[22]

Berdasarkan dua pandangan diatas, Syari'ati mempunyai pandangan yang sangat unik. Ia tidak setuju dengan pengangkat seorang khalifah berdasarkan pemilihan, penunjikan ataupun pewarisan. Sebagaimana *khalifah* yang ada pada kaum Sunni atau *imamah* yang ada pada kaum Syi'ah. Bagi Syari'at, jabatan imam diperoleh melalui pembuktian kemampuan seseorang. Artinya, masyarakat tidak terikat dengan *imam* melalui ikatan pemerintahan, tetapi berdasarkan ikatan orang banak dengan kenyataan yang ada (pada *imam*). singkatnya penunjukan atau pengangkatan imam itu berdasarkan pada kelayakannya.[23]

Walaupun demikian, bukan imam lantas berdiri dibelakag kekuatan eksekuti, tetapi ia memikul tanggung jawab sosial politik secara langsung. Para iamam menurut Syari'ati, *imam* adalah kepala pemerintahan dalam pengertian politik, kepala negara, dan pemimpin umat, sekaligus seorang panutan dalam bidang intelektual yang memikul tanggung jawab memancang rambu-rambu sebagai penunjuk jalan.[24]

---

22. Ali Syari'ati. Intidzar ....hlam. 558

23. Syari'ati, Ummah dan Imamah, hlm. 144-145

24. ibid., hlm. 160-161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id